

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT. BPR RATNA ARTHA PUSAKA**

**TAHUN  
2022**



## DAFTAR ISI

### BAB I PENJELASAN UMUM

### BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

- A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola
  - 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
  - 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
- B. Kepemilikan Saham Direksi
  - 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR
  - 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain
- C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR
  - 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR
  - 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR
- D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
  - 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR
  - 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
- E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
  - 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
  - 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR
- F. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
  - 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
  - 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
- G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
  - 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun
  - 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris
- I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
- J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi
- K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik khususnya pada Bank Perkreditan Rakyat merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan usahanya.

PT Bank Perkreditan Rakyat Ratna Artha Pusaka dikenal dengan BPR Ratna Artha Pusaka adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kegiatan usaha secara konvensional dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dimaksud dalam Undang-Undang tentang perbankan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik selain meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan para pemegang saham dan menambah kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku pada industri perbankan.

Pelaksanaan tata kelola BPR Ratna Artha Pusaka memperhatikan 5 (lima) prinsip dasar, yaitu keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountablity*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*indepedency*) dan kewajaran (*fairness*), untuk semakin meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dalam jangka panjang.

Struktur Tata Kelola BPR Ratna Artha Pusaka terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Pejabat Eksekutif Audit Intern,

Dasar penyusunan Laporan Tata Kelola yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Rudy Ishak
	NIK : -
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR;</li><li>2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sesuai diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan organisasi;</li><li>4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi;</li><li>5. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai;</li><li>6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li><li>7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai;</li><li>8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</li><li>9. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li><li>10. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme(PPT);</li><li>11. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.</li></ol>

2	Nama : F. Xristyastuti
	NIK : -
	Jabatan : Direktur Operasional dan Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR;</li> <li>2. Menyusun rencana kerja bidang keuangan untuk diajukan dan mendapatkan persetujuan RUPS;</li> <li>3. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan operasional bidang keuangan;</li> <li>4. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis BPR (RBB) dalam bidang keuangan;</li> <li>5. Melaksanakan pengendalian keuangan secara menyeluruh;</li> <li>6. Melaksanakan Tata Kelola dalam pelaksanaan kegiatan operasional.</li> <li>7. Melakukan pemantauan proses manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan operasional.</li> </ol> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Membawahkan Fungsi Kepatuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan, otoritas lainnya, dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian;</li> <li>2. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR;</li> <li>3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya;</li> <li>4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan BPR;</li> <li>6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi BPR;</li> <li>7. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li> <li>8. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko;</li> <li>9. Bersama Direksi lain menyusun Kebijakan Sumber Daya Manusia;</li> <li>10. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>11. Melaksanakan Rencana Bisnis BPR dalam bidang sumber daya manusia;</li> <li>12. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis BPR dalam bidang sumber daya manusia.</li> </ol>
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP);</li> <li>2. Kebijakan Manajemen Risiko;</li> <li>3. APU-PPT;</li> <li>4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) Audit Intern.</li> </ol>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	Nama : Hanna Masli
	NIK : -
	Jabatan : Komisaris Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR :</li> <li>2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank dan mengawasi Direksi dalam menjalankannya yaitu debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah;</li> <li>4. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li> <li>5. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li> <li>6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li> <li>b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li> </ol> </li> </ol>
2	Nama : Harto Solichin Margo
	NIK : -
	Jabatan : Komisaris
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR :</li> <li>2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;</li> <li>3. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank dan mengawasi Direksi dalam menjalankannya yaitu debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah;</li> <li>4. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li> <li>5. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li> <li>6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li> <li>d. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li> </ol> </li> </ol>

## Rekomendasi kepada Direksi :

1. Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
2. Kebijakan Manajemen Risiko;
3. APU-PPT;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) Audit Intern.

## B. Kepemilikan Saham Direksi

## 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rudy Ishak	-	300.000.000	15
2	Fransiska Xristyastuti	-	-	-

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rudy Ishak	-	-	-	-
2	Fransiska Xristyastuti	-	-	-	-

## C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

## 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rudy Ishak	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Fransiska Xristyastuti	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rudy Ishak	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Fransiska Xristyastuti	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hanna Masli	-	-	-
2	Harto Solichin Margo	-	1.100.000.000	55

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hanna Masli	-	-	-	-
2	Harto Solichin Margo	-	-	-	-

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Dewan Direksi	Pemegang Saham
1	Hanna Masli	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Harto Solichin Margo	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Hanna Masli	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Harto Solichin Margo	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	603.600.000	2	305.400.000
2	Tunjangan	2	182.605.106	2	41.308.700
3	Tantiem	2	81.400.000	2	40.050.000
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
	Total		867.605.106		386.758.700

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	2 (dua) unit mobil	-

3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,08 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,96 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,09 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,74 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,13 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	24 Januari 2022	2 orang	Pembahasan Pencapaian Rencana Bisnis BPR Triwulan ke 4 Tahun 2021, Pengawasan penerapan Apu PPT.
2	20 April 2022	2 orang	Pembahasan Pencapaian Rencana Bisnis BPR Triwulan ke 1 Tahun 2022, Pengawasan penerapan Apu PPT.
3	19 Juli 2022	2 orang	Pembahasan Pencapaian Rencana Bisnis BPR Triwulan ke 2 Tahun 2022, Pengawasan penerapan Apu PPT.
4	17 Oktober 2022	2 orang	Pembahasan Pencapaian Rencana Bisnis BPR Triwulan ke 3 Tahun 2022, Pengawasan penerapan Apu PPT.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Hanna Masli	-	4	-	100
2	Harto Solichin Margo	-	4	-	100

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Disesuaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindak lanjuti Melalui Proses Hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	Harto Solichin Margo	Pemegang Saham dan Komisaris	-	Rudy Ishak	Direktur Utama	-	Sewa Gedung Kantor	340	Nilai sewa sesuai dengan harga pasar.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	24-11-2022	Sosial	Peduli Cianjur	Perbarindo	1.000.000

M. Hasil Penilaian Sendiri (Self Aesessment)

BPR Ratna Artha Pusaka melakukan penilaian sendiri (self assessment) pada tahun 2022 atas penerapan dan tata kelola sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015, SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2020 perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola BPR.

Penilaian tersebut terdiri atas 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu :

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola;
2. Proses Penerapan Tata Kelola;
3. Hasil Penerapan Tata Kelola.

Dari aspek tersebut di atas, diterapkan pada 10 (sepuluh) faktor penilaian yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Penerapan Benturan Kepentingan;
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan;

5. Penerapan Fungsi Audit Intern ;
6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern ;
7. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Pengendalian Intern;
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
9. Rencana Bisnis Bank; dan
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola tahun 2022 diperoleh nilai komposit 2,1 dengan peringkat komposit adalah “Baik”, sebagaimana tercermin pada tabel di bawah ini :

No.	Faktor yang Dinilai	Bobot (B) (%)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20,00	1,67	0,334
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15,00	1,99	0,299
3	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00	2,90	0,290
4	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10,00	2,47	0,247
5	Penerapan Fungsi Audit Intern	10,00	2,30	0,230
6	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,50	1,30	0,033
7	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10,00	2,40	0,240
8	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,50	2,10	0,158
9	Rencana Bisnis BPR	7,50	2,00	0,150
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,50	1,95	0,146
	Nilai Komposit	100		2,1
	Peringkat Komposit			Baik

## N. Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola

Nama BPR : PT BPR Ratna Artha Pusaka

Posisi : Tahun 2022

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,1	Baik
Analisis	
<p>1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Struktur dan infrastruktur tata kelola BPR cukup memadai sesuai dengan peraturan OJK.</p> <p>2. Proses Tata Kelola Proses tata kelola atas struktur dan infrastruktur telah berjalan dengan cukup baik, walaupun demikian masih terdapat temuan dalam pemeriksaan OJK.</p> <p>3. Hasil Tata Kelola Laporan transparansi memadai, kepatuhan terhadap peraturan dilaksanakan dengan cukup baik dan permasalahan yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan cukup baik.</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) penerapan tata kelola tahun 2022 diperoleh nilai komposit 2,1 dengan peringkat komposit adalah “Baik”.</p>	

Demikian Laporan Tata Kelola PT BPR Ratna Artha Pusaka untuk tahun 2022 ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT BPR Ratna Artha Pusaka

Bandung, 25 Januari 2023



*Hanna Masli* *Rudy Ishak*

Hanna Masli  
Komisaris Utama

Rudy Ishak  
Direktur Utama